

SOP PERIZINAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dasar hukum : Surat Keputusan No. Pol.: Skep/638/XII/2009

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Izin Usaha Jasa konsultasi keamanan	Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf f, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Surat rekomendasi dari POLDA setempat	1. Mekanisme Pelayanan terhadap pemohon PMDN a. BUJP mengajukan dokumen permohonan Surat Izin Operasional (SIO) dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan umum ke <i>front office</i> PTSP yang telah disediakan oleh BKPM; b. Petugas melakukan pengecekan dokumen permohonan SIO dengan durasi 30 menit; c. Dokumen permohonan SIO yang diajukan kepada Dirbinmas Baharkam POLRI guna pengesahannya adalah Dokumen yang dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan umum oleh petugas yang ditunjuk, dengan durasi paling lambat 7 hari; d. Apabila dokumen permohonan tidak lengkap, petugas akan langsung menginformasikan kekurangan dokumen
2	Izin Usaha jasa penerapan peralatan keamanan			
3	Izin Usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan			
4	Izin Usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga			
5	Izin Usaha Jasa penyediaan tenaga keamanan			
6	Izin Usaha jasa penyediaan satwa			
			b. Akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; c. Struktur organisasi badan usaha; d. Daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/ <i>curriculum vitae</i> masing-masing; e. Surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat; h. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait; i. Bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku; j. Surat pernyataan bermaterai akan menggunakan Gam Satpam sesuai dengan ketentuan POLRI; k. Surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<p>pengamanan, yang terdaftar di POLRI;</p> <p>l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha;</p> <p>m. Izin prinsip dari BKPM untuk PMA.</p>	<p>permohonan dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>e. Petugas akan menginformasikan kepada BUJP apabila SIO sudah jadi untuk diambil di front office BKPM.</p> <p>2. Mekanisme Pelayanan terhadap pemohon PMA</p> <p>a. BUJP mengajukan dokumen permohonan Surat Izin Operasional (SIO) dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan umum ke <i>front office</i> PTSP yang telah disediakan oleh BKPM;</p> <p>b. Untuk BUJP PMA dengan kepemilikan saham 49% dalam negeri dan 51% asing harus mendapatkan izin prinsip terlebih dahulu dari BKPM, untuk selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi POLDA setempat dan SIO dari Kapolri;</p> <p>c. Petugas melakukan pengecekan dokumen permohonan SIO dengan durasi 30 menit;</p> <p>d. Dokumen permohonan SIO yang diajukan kepada Dirbinmas Baharkam POLRI guna</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
				<p>pengesahannya adalah Dokumen yang dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan umum oleh petugas yang ditunjuk, dengan durasi paling lambat 7 hari;</p> <p>e. Apabila dokumen permohonan tidak lengkap, petugas akan langsung menginformasikan kekurangan dokumen permohonan dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>f. Petugas akan menginformasikan kepada BUJP apabila SIO sudah jadi untuk diambil di <i>front office</i> BKPM.</p> <p>3. Dalam proses penerbitan surat izin operasional BUJP tidak dipungut biaya.</p>